

**KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN
MASYARAKAT NELAYAN:
STUDI DENGAN PENDEKATAN EKONOMI DAN SOSIAL**

Mochamad Ridwan; Izharudin; Waldi Noviyarsah

*Program Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bengkulu
E-mail : mochamadridwan61@gmail.com*

ABSTRAK

Permasalahan krusial yang dihadapi oleh masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional di wilayah perdesaan adalah masalah kedalaman dan keparahan kemiskinan, Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan serta mengungkap penyebab terjadinya melalui kajian empiris dan teoritis dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan mengambil kasus masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir perdesaan Bengkulu. Desa yang terpilih sebagai sampel wilayah adalah Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dari masyarakat nelayan dinilai *cukup tinggi* (kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat nelayan cukup dalam dan cukup parah). Temuan lain menunjukkan cukup tingginya kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan (nelayan tradisional) berawal dari rendahnya kemampuan nelayan yang diproksikan oleh rendahnya upaya/effort (sarana dan prasaran perikanan tangkap), sistem permodalan yang bersifat primordial (patron-klien), dan sistem pemasaran tidak kondusif dan tidak transparan.

Kata Kunci: Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan, Masyarakat Nelayan, Pendekatan Ekonomi Dan Sosial

ABSTRACT

The crucial problem faced by the fishermen community, especially traditional fishermen in rural areas is the problem of poverty depth and severity. The purpose of this study is to identify the index of poverty depth and severity in the fishermen community and to reveal the causes of its occurrence through empirical and theoretical studies with economic and social approaches. This study is survey research by taking the case of fishermen community in the rural coastal of Bengkulu. The selected village as the sample area is Pasar Palik Village, Air Napal Sub-District, Bengkulu

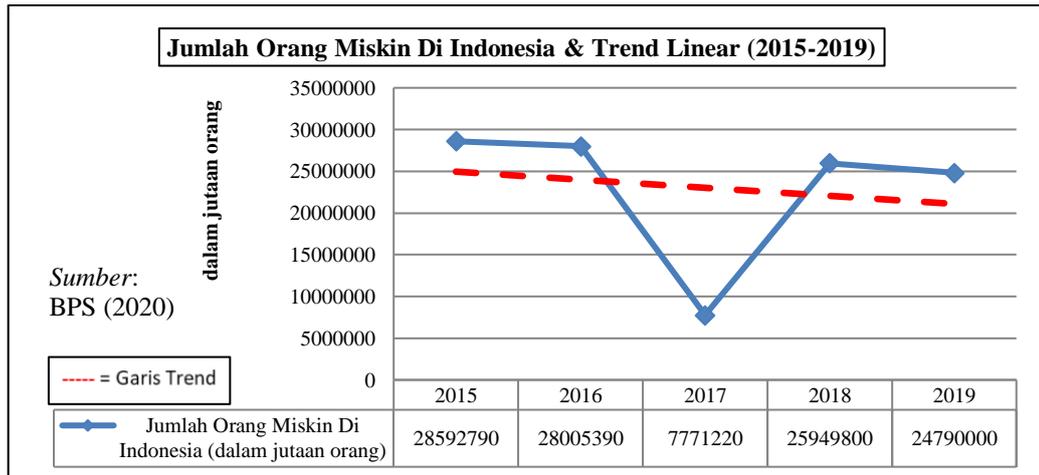
Utara District. Data analysis was carried out using the quantitative method and the qualitative-descriptive method. The results show that the poverty depth and severity indexes of the fishermen community are considered quite high (poverty that occurred in the fishermen community is quite deep and quite severe). Other results show that the high depth and severity of poverty in the fishermen community (traditional fishermen) stems from the low ability of fishermen as proxied by low effort (capture fisheries facilities and infrastructure), primordial capital system (patron-client), and the marketing system (marketing channels) is not conducive/not open.

Keywords: Poverty Depth Index, Poverty Severity Index, Fishermen Community, Economic And Social Approaches

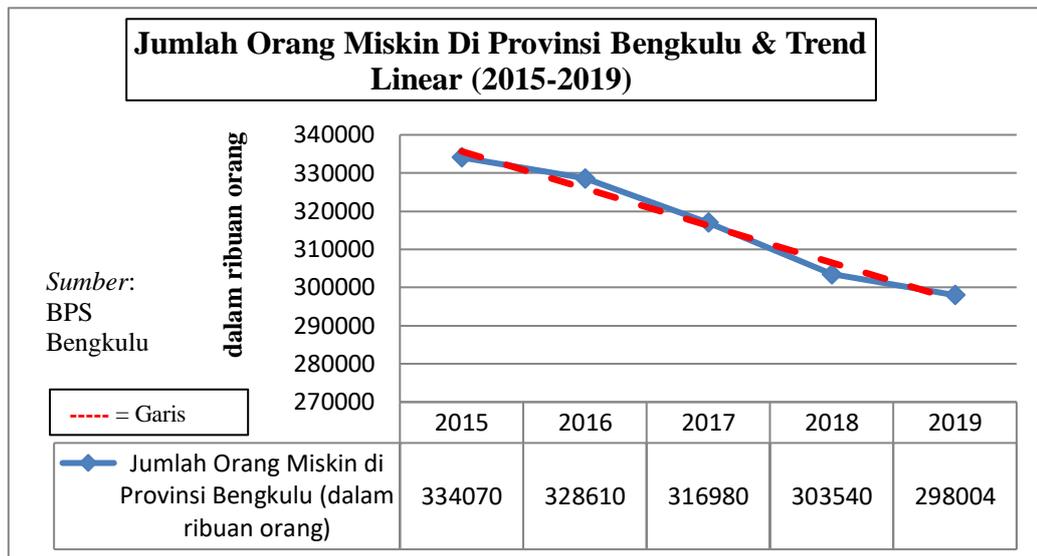
PENDAHULUAN

Logika berfikir Nurkse terpenting adalah berkaitan dengan proses terjadinya lingkaran kemiskinan dalam masyarakat (perdesaan dan perkotaan), yang mekanismenya berawal dari kondisi keterbelakangan/ketertinggalan masyarakat, ketidaksempurnaan sistem pasar, dan kekurangan modal akibat jeleknya sistem permodalan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga faktor tersebut membawa pengaruh terhadap semakin rendahnya produktivitas seseorang. Dampak dari produktivitas yang rendah adalah semakin memperendah pendapatan yang diterima masyarakat (semakin memperdalam dan memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat). Implikasi berikutnya adalah semakin rendah kemampuan masyarakat dalam meningkatkan tabungan dan pada sektor bisnis terjadi kecenderungan penurunan investasi. Kondisi tersebut jika tidak mampu diatasi, maka akan semakin memperparah tingkat kemiskinan/keterbelakangan masyarakat tersebut dari kondisi sosial ekonominya. Oleh karena itu setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk “memotong” lingkaran dari perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2010).

Kondisi empiris di Indonesia menunjukkan perkembangan jumlah orang miskin dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus-menerus mengalami penurunan (terjadi *trend* yang menurun), kendati penurunannya tidak terlalu tajam. Fenomena penurunan ini, secara regional terjadi juga di wilayah Provinsi Bengkulu dan penurunannya cukup tajam (BPS Provinsi Bengkulu, 2020). Pola kecenderungan (*trend*) penurunan jumlah orang miskin di Indonesia dan di Provinsi Bengkulu ini, terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Khususnya di perdesaan, kecenderungan (*trend*) jumlah orang miskin tentu melibatkan mereka yang berprofesi sebagai nelayan atau sebagai petani, yang kedua kelompok tersebut pada umumnya hidup di wilayah perdesaan. Lebih rinci, fenomena kecenderungan (*trend*) jumlah penduduk miskin di Indonesia dan di Provinsi Bengkulu ini diperlihatkan melalui Gambar 1a dan Gambar 1b.



Gambar 1a: Kecenderungan (*Trend*) dari Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2015-2019)



Gambar 1b: Kecenderungan (*Trend*) dari Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu (2015-2019)

Data Susenas (BPS Bengkulu, 2020) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu, sebagian besar berada di wilayah perdesaan (di dalamnya sebagian besar terdiri dari masyarakat pesisir), dan bahkan di Indonesia sendiri nelayan kecil merupakan kelompok yang paling dominan dan merupakan kelompok nelayan tangkap kecil/tradisional merupakan kelompok paling miskin dibanding kelompok yang lain (Kusdiantoro *et al.*, 2019). Fenomena ini dapat diamati dari kegiatan kesehariannya yang hanya mengandalkan hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hampir sebagian besar nelayan tangkap dalam kategori miskin mengandalkan kehidupan dan

penghidupannya pada sumberdaya alam kelautan, tanpa memiliki sumber penghidupan lainnya. Provinsi Bengkulu sendiri, kendati potensi sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkapnya masih dalam kategori *underfishing* atau potensinya masih cukup besar untuk dilakukan eksploitasi secara optimal dan berkelanjutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan (kondisi kemiskinan masih cukup tinggi) (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2019); (Monang dan Bangun, 2018).

Sisi lain menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan disebabkan oleh tekanan-tekanan yang tidak hanya bersumber dari lingkungan eksternal seperti faktor badai (angin kencang) atau fluktuasi musim ikan yang tidak menentu, namun juga berasal dari lingkungan internal nelayan itu sendiri seperti keterbatasan sumberdaya modal, akses, dan faktor sikap yang depletif seperti terjadinya pengurasan sumberdaya alam kelautan secara berlebihan melalui penggunaan sarana tangkap yang sangat tidak sesuai (cenderung merusak lingkungan). Dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka karena semakin sulitnya mendapatkan ikan hasil tangkapan yang sesuai dengan harapan. Hasil studi lain juga menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan pada umumnya terkait dengan permasalahan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fenomena kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan ini mengarah kepada bentuk permasalahan yang bersifat krusial dan tidak mudah untuk diatasi (Anwar, 2019); (Irwan, 2017).

Secara normatif, tujuan dari pemanfaatan sumberdaya alam kelautan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat nelayan. Sebagai anugerah (*endowment*), sumberdaya alam kelautan yang dikelola secara konservatif, seharusnya dapat menopang kehidupan perekonomian masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan yang mata pencaharian pokoknya hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan dari laut. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan senantiasa berhadapan dengan faktor ketidakpastian dan risiko yang tinggi (terkait dengan keberadaan sumberdaya kelautan/perikanan laut yang bersifat selalu bergerak dan resiko badai). Hal ini tentu akan membawa dampak terhadap kehidupan dan penghidupan komunitas nelayan dari waktu ke waktu, apalagi jika diperparah dengan sikap yang depletif dalam cara pengelolaannya (Fauzi, 2010); (Wijaya & Fauzie, 2020).

Menurut Gordon dalam Fauzi (2010), sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap akan mengalami tangkap lebih secara ekonomi (*economic overfishing*) jika pengelolaannya tidak diatur dan tidak dikendalikan secara baik oleh pemerintah (*uncontrollable*) (seperti yang telah diisyaratkan oleh teori "*tragedy of the commons*" dari Garrett Hardin). Fenomena ini terjadi karena sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap tidak seperti sumberdaya alam yang lain (misalnya sumberdaya alam pertanian yang sifat kepemilikannya cukup jelas). Sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap merupakan sumberdaya alam milik umum (*common natural resources*) atau mempunyai sifat akses terbuka (*open*

access), artinya semua individu dalam masyarakat dapat mengakses atau mengeksploitasi sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap tanpa ada batasan, sehingga sering muncul eksek yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencemaran di lautan yang akan mengganggu stabilitas dari sumberdaya alam kelautan. Karakteristik sumberdaya alam seperti ini menyebabkan nelayan harus selalu bergerak dalam mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal (Prasetyo, 2019); (Rakhmanda et al., 2018); (Vince & Hardesty, 2018).

MATERI DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer mencakup data yang diambil secara langsung dari obyek penelitian yaitu dari masyarakat nelayan yang ada di wilayah Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten induk disamping dua kabupaten lainnya sebagai kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Muko-muko dan Bengkulu Tengah. Oleh karena itu, masyarakat nelayan yang dijadikan sampel penelitian diasumsikan telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonominya ke arah yang lebih baik (tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya mengalami perubahan/pengurangan secara signifikan). Data sekunder bersumber dari laporan-laporan berbagai institusi terkait, seperti BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bengkulu serta Dinas Kelautan/Perikanan Provinsi Bengkulu.

Analisi Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei (*the survey research*), yang bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan kedalaman dan keparahan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat nelayan perdesaan sebagai sampel penelitian. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif (*deductive approach*), dengan maksud bahwa penelitian empiris ini dilakukan melalui proses pengkajian terlebih dulu terhadap berbagai teori, dalil, dan aksioma sebagai landasan berpijak dalam melakukan kegiatan penelitian lapangan seperti kegiatan pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus/FGD.

Variabel-variabel penting yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 1) Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dari masyarakat nelayan (tradisional), yang diukur dengan satuan indeks; 2) Nelayan tradisional, yang diukur dengan satuan unit orang atau satuan unit kelompok orang (nelayan tradisional); 3) Sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap (jumlah produksi dari masyarakat nelayan),

yang diukur dengan satuan unit kg/kwintal; dan 4) Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan dari masyarakat nelayan, yang diukur dengan satuan unit pangan (makanan) dan perumahan/sandang (bukan makanan) (didasarkan pada Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar Tahun 2004).

Sampel yang terpilih sebagai responden sebanyak 43 nelayan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap. Sampel yang berperan sebagai pemberi informasi kunci (*key informant*) diambil dari para tokoh masyarakat nelayan dan instansi-instansi terkait seperti dinas kelautan dan perikanan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan/secara sengaja (*purposive sampling method*). Data dikumpulkan melalui metode: wawancara mendalam (*depth interview*), observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode/teknis analisis:

(1) Metode Analisis Kuantitatif Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan (untuk masyarakat/komunitas nelayan), dengan formulasi sebagai berikut:

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Depth Index-P₁*). Indeks ini menunjukkan besar rata-rata pengeluaran masyarakat nelayan miskin menyimpang dari garis kemiskinannya, dengan rumus umum sebagai berikut:

$$P\alpha = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha, \text{ di mana:}$$

- Jika $\alpha = 1$, maka P_1 = Indeks kedalaman kemiskinan masyarakat nelayan;
- z = garis kemiskinan;
- y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masyarakat nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$;
- n = jumlah masyarakat nelayan; dan
- q = banyaknya masyarakat nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan.

b. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*). Indeks ini memberikan informasi tentang gambaran penyebaran pengeluaran di antara masyarakat nelayan miskin, dengan rumus umum sebagai berikut:

$$P\alpha = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha, \text{ di mana:}$$

- Jika $\alpha = 2$, maka P_2 = Indeks keparahan kemiskinan masyarakat nelayan;
- z = garis kemiskinan;
- y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masyarakat nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$;
- n = jumlah masyarakat nelayan; dan
- q = banyaknya masyarakat nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan.

- (2) Metode Analisis Kualitatif-Deskriptif, yang mencakup deskripsi detail dan elaborasi secara menyeluruh dari semua permasalahan kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan/Temuan: Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Masyarakat Nelayan

1. Berbasis pada data yang telah dikumpulkan melalui metode dokumentasi (data sekunder) dan metode wawancara (data primer), dapat diidentifikasi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan sebagai berikut:

(1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1):
$$P_1 = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^1$$

- Berdasarkan data yang diperoleh ($z = \text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan; $y_i = \text{Rp. } 165.000,-$ perkapita/bulan; $n = 498$ nelayan; dan $q = 281$ nelayan), maka:

$$P_1 = 1/498 \times [(369.367 - 165.000)/369.367]^1 = 0,002 \times [(0,553 \times 281) - (0,553 \times 1)]$$

$$P_1 = 0,002 \times (155,393 - 0,553) = 0,002 \times 154,840 = \underline{0,310}.$$

- Angka ini mengindikasikan bahwa penyimpangan besar rata-rata pengeluaran masyarakat nelayan miskin dari garis kemiskinannya ($\text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan) adalah *cukup tinggi* (kedalaman kemiskinan masyarakat nelayan *cukup dalam*).

(2) Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2):
$$P_2 = \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^2$$

- Berdasarkan data yang diperoleh ($z = \text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan; $y_i = \text{Rp. } 165.000,-$ perkapita/bulan; $n = 498$ nelayan; dan $q = 281$ nelayan), maka:

$$P_2 = 1/498 \times [(369.367 - 165.000)/369.367]^2 = 0,002 \times [(0,306 \times 281) - (0,306 \times 1)]$$

$$P_2 = 0,002 \times (85,932 - 0,306) = 0,002 \times 85,626 = \underline{0,171}.$$

- Angka indeks ini mengindikasikan penyebaran/ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara masyarakat nelayan miskin dengan garis kemiskinannya ($\text{Rp. } 369.367,-$ perkapita/bulan) adalah *cukup besar* (keparahan kemiskinan masyarakat nelayan *cukup parah*).

2. Hasil jawaban dari 43 responden (masyarakat nelayan yang dijadikan sampel penelitian), ditemukan/terungkap 9 permasalahan berkaitan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan, yaitu:

- 1) Nelayan tradisional dihadapkan pada permasalahan ketidakberdayaan dalam aspek prasarana (infrastruktur) seperti keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang tidak berfungsi sebagai tempat pelelangan atau pasar hasil tangkapan ikan laut.
- 2) Hampir semua nelayan tradisional di desa penelitian berstatus sebagai anak buah kapal (ABK), artinya mereka tidak memiliki aset/sarana kapal (hanya menumpang kepada pemilik kapal) atau sarana/alat penangkap ikan masih sangat sederhana.
- 3) Motivasi kerja nelayan relatif rendah, yang ditunjukkan oleh dua indikator penting yaitu jam kerja melaut kurang dari 12 jam (kurang dari sehari) dan jarak nelayan yang relatif dekat.
- 4) Pendapatan (hasil tangkapan ikan) tidak menentu, akibat dari rendahnya kualitas sarana tangkap (kapal/perahu dan jaring tangkap yang sederhana).
- 5) Secara umum, nelayan berpendidikan Sekolah Dasar.
- 6) Modal kerja relatif rendah (hanya berasal dari modal sendiri) dan kesulitnya mendapatkan sumber permodalan yang sesuai dengan harapan nelayan.
- 7) Pemasaran hasil tidak transparan karena dimonopoli/dikuasai oleh para tengkulak (toke), yang biasanya berfungsi sebagai pemberi modal.
- 8) Masih rendahnya intensitas pembinaan atau penyuluhan dari pemerintah (dinas kelautan dan perikanan).
- 9) Belum tersedianya lembaga koperasi perikanan laut yang berada di sekitar masyarakat nelayan, yang dapat membantu nelayan sebagai penyedia sarana tangkap, penyedia permodalan, dan penyalur pemasaran hasil tangkapan ikan laut.

Pembahasan/Analisis Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Penyebab Terjadinya (Pendekatan Ekonomi dan Sosial)

Pembahasan/analisis hasil perhitungan dan temuan penelitian (berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi bersama yang terfokus/FGD dengan 8 tokoh masyarakat nelayan), penyebab *cukup tingginya* angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada masyarakat nelayan (tradisional) dapat diuraikan melalui bahasan dan analisis berbasis pada pendekatan ekonomi dan sosial berikut.

1. Berbasis Pendekatan Ekonomi (*Economic Approach*)

Ada 4 penyebab cukup tingginya angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan (tradisional) di perdesaan berbasis pada pendekatan ekonomi:

- a. **Upaya (*Effort*) dalam bentuk sarana dan prasarana (infrastruktur).**

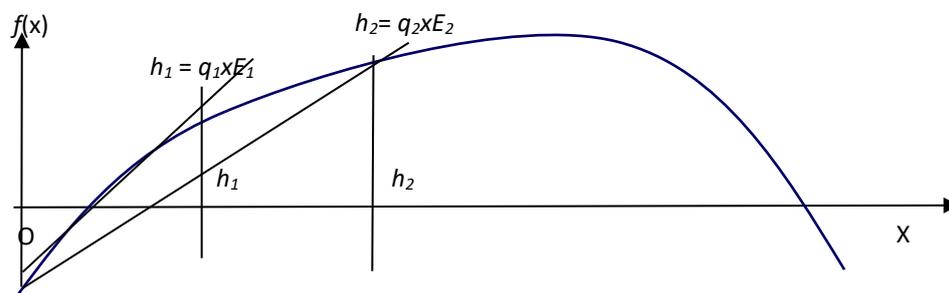
Lemahnya/terbatasnya upaya (*effort*) dalam bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan tradisional menyebabkan tingginya angka indeks kedalaman dan kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Ketergantungan nelayan yang sangat tinggi terhadap aset sarana seperti kualitas armada/kapal/perahu dan sarana tangkap (jaring atau pancing), berpengaruh terhadap kemampuan nelayan pada jarak dan waktu yang ditempuh dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut dan produktivitas hasil tangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan itu sendiri (kondisi masyarakat nelayan yang miskin ini diakibatkan oleh sarana yang digunakan dalam proses penangkapan relatif sederhana). Prasarana (infrastruktur) seperti tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan mekanisme pemasaran ikan laut hasil tangkapan menjadi tidak efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya perlindungan terhadap nelayan kecil dari tekanan-tekanan nelayan besar khususnya dalam permasalahan upaya (*effort*) dalam wujud sarana dan prasarana (Hikmah & Nasution, 2018).

Fenomena ini dikuatkan oleh teori "Logistic Growth" (Gambar 2), yang mengindikasikan hasil pengelolaan (produksi) sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap/perikanan laut (dengan inisial "h") dipengaruhi oleh upaya/*effort* nelayan (dengan inisial "E"/*effort*). Hasil produksi eksploitasi sumberdaya alam perikanan tangkap (h) diasumsikan sebagai fungsi dari upaya (*effort*/E) dan cadangan (*stock*) sumberdaya perikanan tangkap (dengan inisial "x"), sehingga formulasinya dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut:

- $h = f(x, E)$, di mana E = Upaya (*Effort*), yang merupakan indeks dari berbagai faktor produksi, yang di dalamnya tercakup prasarana (infrastruktur perikanan tangkap) seperti keberadaan atau fungsi dari tempat pelelangan/pemasaran ikan (kualitas sistem pemasaran) dan sarana tangkap seperti kualitas kapal, alat tangkap, dan sarana lainnya.
- Secara eksplisit, fungsi produksi tersebut dapat diubah menjadi $h = q.E$ (q adalah koefisien kemampuan tangkap atau sebagai proporsi stok ikan yang dapat ditangkap oleh satu unit kemampuan tangkap). Hubungan kausalitas ini menunjukkan kinerja hasil pengelolaan sumberdaya alam perikanan tangkap yang tergantung pada tingkat kemampuan tangkap (kemampuan modal kerja dan kemampuan managerial) dari nelayan dan upaya (*effort*). Semakin tinggi kualitas kemampuan tangkap dan upaya yang dimiliki nelayan, pada gilirannya akan mempertinggi kinerja hasil produksi sumberdaya alam kelautan/perikanan tangkap (Fauzi, 2010).

Gambar 2 memperlihatkan perubahan posisi E (*Effort*) dari E_1 menjadi E_2 , yang memberi makna kinerja hasil produksi perikanan tangkap (h) secara berturut-turut berubah (meningkat) sesuai

dengan perubahan (peningkatan) besaran E (*Effort*). Kinerja hasil produksi perikanan tangkap h_1 lebih rendah dari h_2 . Secara kontekstual, fenomena ini dapat dijelaskan bahwa ketika kondisi E (*effort*) dari nelayan miskin berada pada posisi paling rendah (E_1), kinerja hasil produksi sumberdaya alam perikanan tangkap (h_1) dalam kondisi rendah. Ketika E (*Effort*) ditingkatkan kualitasnya/diberdayakan menjadi E_2 , kinerja hasil produksi dari sumberdaya alam perikanan tangkap menjadi semakin meningkat (posisi produksi perikanan tangkap meningkat menjadi h_2). Dengan kata lain, masyarakat nelayan kecil menjadi semakin berdaya (kesejahteraan nelayan kecil semakin meningkat).



Gambar 2: Teori “Logistic Growth” dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Tangkap

b. Sistem permodalan.

Bagi masyarakat nelayan, permodalan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dan urgen bagi pengembangan kinerja dan produktivitas usaha nelayan. Hasil wawancara dan diskusi (FGD/*Focus Group Discussion*) dengan kelompok nelayan tradisional, memberi indikasi masyarakat nelayan sangat membutuhkan permodalan dalam bentuk sarana (kapal/perahu dan alat tangkap). Hal ini disebabkan sarana penangkap ikan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kesehariannya untuk melakukan aktivitas menangkap ikan di laut. Masyarakat nelayan tidak hanya urgen akan kebutuhan sarana tangkap saja, tetapi juga kebutuhan akan modal kerja (dana yang dibutuhkan pada saat melakukan aktivitas nelayan) seperti modal untuk BBM (bahan bakar minyak), makan, dan minum. Masyarakat nelayan juga dihadapkan pada sistem permodalan yang bersifat “mengikat”, di mana para pemberi modal (yang secara umum dilakukan oleh para toke ikan/pemasar ikan, nelayan kelas besar, atau pemberi permodalan), dalam memberikan pinjaman permodalan kepada nelayan terutama nelayan tradisional/nelayan kecil “selalu” disertai dengan “syarat tertentu sebagai bentuk ikatan”, seperti keharusan menjual hasil tangkapan ikan kepadanya (tidak diperbolehkan ke tempat/pemasar lain). Dikuatkan oleh hasil penelitian Kornitasari *et al.* (2019), yang memperlihatkan sistem permodalan yang berlaku pada masyarakat

nelayan di Kabupaten Malang Selatan, yaitu dengan menggunakan model “Principal Agent”. Model ini system permodalan yang dapat diakses oleh nelayan melalui 3 sumber yaitu perbankan, modal sendiri, dan dari pemodal (pengambek-istilah masyarakat nelayan di Kabupaten Malang Selatan).

c. Faktor Sistem Pemasaran/Saluran Pemasaran (*marketing-chain*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran untuk hasil penangkapan ikan laut oleh masyarakat nelayan menghadapi permasalahan yang serius. Masyarakat nelayan kecil tidak mampu menyalurkan hasil tangkapan perikanan lautnya seperti yang diharapkan. Terjadinya hambatan saluran pemasaran ini disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) tidak adanya prasarana (infrastruktur) tempat pelelangan ikan (TPI) yang berfungsi sebagai tempat pemasaran seperti model “pelelangan” yang sesungguhnya. Pemasaran hanya dilakukan secara parsial (satu saluran pemasaran) yaitu saluran yang hanya dilakukan antara nelayan dengan para “toke ikan” (cenderung tidak transparan), sehingga senantiasa terjadi penentuan/keputusan harga yang “tidak adil” (tingkat harga yang jauh lebih rendah dari tingkat harga pasar yang sesungguhnya/*real-price*). 2) adanya ikatan yang tidak nampak (*invisible-binding*) antara nelayan (sebagai penghasil perikanan laut) dengan

para “toke” (sebagai penyalur pemasaran/penerima/pembeli hasil tangkapan ikan dari nelayan), menyebabkan munculnya keengganan dan bahkan rasa takut dari pihak nelayan untuk menjual/memasarkan hasil tangkapan ikannya ke pemasar ikan lain (yang mampu memberikan harga yang jauh lebih tinggi). Diungkap oleh Susilawati, (2019) bahwa secara umum ada 3 saluran pemasaran hasil tangkapan ikan laut yang secara umum terjadi pada masyarakat nelayan, yaitu melalui TPI (dilakukan dengan sistem pelelangan), dipasarkan ke pengepul ikan, dan langsung dipasarkan ke pengecer. Ketiga cara pemasaran ini membawa dampak yang berbeda satu sama lain, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan nelayan (terutama nelayan kecil).

d. Peranan lembaga perkoperasian terkait.

Peranan yang sangat kecil dari lembaga koperasi yang terkait dengan jenis matapencaharian masyarakat (kondisi empiris menunjukkan tidak adanya koperasi perikanan laut di sekitar masyarakat nelayan). Padahal secara normatif dan empiris, posisi lembaga koperasi ini sangat penting dan sangat strategis dalam mengangkat keterpurukan kemiskinan masyarakat nelayan, terutama dalam mengangkat kedalaman dan keparahannya.

Pernyataan/kesimpulan ini diambil dari hasil diskusi bersama (FGD) dengan masyarakat nelayan yang ada di Desa Pasar Palik. Lembaga koperasi perikanan laut di wilayah perdesaan sangat dibutuhkan khususnya untuk memutus mata rantai sistem permodalan yang ada dalam lingkungan masyarakat nelayan yang cenderung merugikan (lebih mengarah ke bentuk patron-client) (Aida *et al.*, 2020); (Arifandy *et al.*, 2020).

2. Berbasis Pendekatan Sosial (*Social Approach*)

Ada 3 penyebab cukup tingginya angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan (tradisional) di perdesaan berbasis pendekatan sosial:

a. **Modal Sosial (*Social Capital*) dalam bentuk sikap kerjasama (*cooperation*).**

Masyarakat nelayan mempunyai sikap kerjasama dengan pihak eksternal (kelompok di luar masyarakat nelayan) yang relatif rendah. Hasil wawancara dan diskusi bersama (FGD) dengan para tokoh masyarakat nelayan, terungkap bahwa salahsatu bentuk lemahnya/rendahnya kerjasama adalah rendahnya partisipasi masyarakat nelayan terhadap keberadaan prasarana/infrastruktur tersedia seperti keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai wujud dari sikap kerjasama (aspek modal sosial). Penyebab keengganan masyarakat nelayan memanfaatkan fasilitas TPI adalah rendahnya kesadaran masyarakat nelayan akan manfaat/pentingnya bentuk "pelelangan" dalam proses penentuan harga pasar yang lebih menguntungkan dan bersifat terbuka dari pada dilakukan secara sendiri-sendiri dengan para tengkulakikan (toke ikan) (Darwis & Zulkarnain, 2020).

b. **Peran Lembaga Pemerintah Terkait.**

Secara normatif, lembaga-lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan seharusnya mampu berperan dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, pembimbingan, mediasi, dan literasi; agar kinerja nelayan meningkat secara bersama-sama atau paling tidak beriringan. Hasil diskusi (FGD) dengan para tokoh nelayan, memberikan gambaran realitas yang kontradiktif, yakni belum dirasakannya peranan pemerintah (Dinas Kelautan & Perikanan) yang sesungguhnya khususnya berkaitan dengan aspek bantuan permodalan dan pemasaran hasil tangkapan ikan laut.

c. **Kondisi cuaca (badai) yang dihadapi**

Secara sosial, keseluruhan masyarakat nelayan senantiasa dihadapkan dengan kondisi cuaca (badai). Kondisi ketergantungan nelayan yang kuat terhadap cuaca (badai) ini disebabkan oleh konsekuensi profesi nelayan yang berhadapan secara langsung dengan kondisi cuaca (badai) tersebut. Semakin kuat badai (cuaca

jelek), akan mempertinggi resiko terhadap aktivitas nelayan di laut. Faktor cuaca jelek (badai) inilah yang menyebabkan nelayan (terutama nelayan tradisional) berhenti melaut dengan waktu yang tidak bisa dipastikan. Kondisi yang “idle” ini mengakibatkan nelayan dalam waktu tertentu tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali dan kondisi keterpurukan ini tidak mampu digantikan oleh kegiatan/pekerjaan lain (pekerjaan sampingan) yang diharapkan berfungsi sebagai “katup pengaman” dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga nelayan. Kondisi keterpurukan inilah, nelayan terutama nelayan tradisional terjebak dalam kedalaman dan keparahan kemiskinan yang cukup tinggi.

KESIMPULAN

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) dari dari $P_1 = 0,310$ (kesimpulan: *cukup dalam*) dan $P_2 = 0,171$ (kesimpulan: *cukup parah*). Cukup tingginya angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masyarakat nelayan di wilayah perdesaan Provinsi Bengkulu, disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial. Dilihat dari pendekatan ekonomi, terdapat 4 faktor penyebab: lemahnya/terbatasnya faktor “upaya (*effort*)” berbentuk sarana dan prasarana (infrastruktur), masih tingginya ketergantungan nelayan tradisional pada faktor gangguan cuaca (badai), lemahnya sistem permodalan, dan lemahnya peranan lembaga koperasi perikanan laut yang ada di lingkungan masyarakat nelayan. Dilihat dari pendekatan sosial, terdapat 3 faktor penyebab: masih lemahnya/rendahnya kualitas kerjasama (*cooperation*) sebagai salahsatu wujud modal sosial (*social capital*) dengan pihak eksternal, masih rendahnya peranan lembaga pemerintah terkait dalam aspek pembinaan, penyuluhan, pembimbingan, mediasi, dan literasi guna meningkatkan kinerja nelayan; dan ketergantungan masyarakat nelayan (secara sosial/secara kelompok) yang kuat terhadap cuaca jelek (badai) dan berpengaruh terhadap aktivitas nelayan di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, K. N., Agustang, A., Arlin, A., & Agustang, A. D. M. 2020. The patron-client relationship patterns in Siwa Lima fishermen community, Aru Islands district Maluku, Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Anwar, Z. W. 2019. Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioireligius*, 1(4).
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. 2020. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif

Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi.*
<https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>

Darwis, & Zulkarnain. 2020. The Effect of Social Capital Assets to the Success of Fisherman's Household Moving out of Poverty. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.*
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/430/1/012023>

Hikmah, H., & Nasution, Z. 2018. Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2).
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>

Irwan, M. 2017. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Business.*

Kornitasari, Y., Manzilati, A., & Efani, A. 2019. Principal Agent Dalam Industri Perikanan Tangkap; Kontrak Yang Memperkuat Atau Melemahkan? (Studi Kasus Perikanan Tangkap Di Pesisir Malang Selatan). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan.*
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.7396>

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonometrika Pembangunan. UPP STIM YKPN.

Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. 2019. Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret Dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2).
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>

Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. 2018. Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574>

Prasetyo, K. C. 2019. Mencegah Tragedy of The Commons Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Governance Innovation.* <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.294>

Rakhmanda, A., . S., & Supardi Djasmani, S. 2018. Role of Fisher Group in The Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23225>

Susilawati, S. 2019. Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif

Ekonomi Islam). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1).
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.152>

Vince, J., & Hardesty, B. D. 2018. Governance solutions to the tragedy of the commons that marine plastics have become. In *Frontiers in Marine Science* (Vol. 5, Issue JUN). <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00214>

Wijaya, A. B., & Fauzie, A. 2020. Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2). <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>